

SAMBUTAN
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PADA ACARA PEMBUKAAN

**PENYERAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019**

TANGGAL, 08 FEBRUARI 2019

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

**YTH. SAUDARA DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI;**

**YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAN PARA DIREKTUR DI
LINGKUNGAN DITJEND. BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN;**

**YTH. SAUDARA KAKANWIL DITJEND. PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA;**

**YTH. PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DITJEND. BINA
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN;**

**YTH. PARA PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA YANG BERHADIR.**

PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MENGAWALI SAMBUTAN INI PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA PADA HARI INI KITA DAPAT BERHADIR DISINI DALAM RANGKA PEMBUKAAN ACARA PENYERAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA BAPAK DIRJEND. BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI BESERTA SELURUH ROMBONGAN, DAN PESERTA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA. MUDAH-MUDAHAN BAPAK DAN IBU SEKALIAN MERASA SENANG DAN KERASAN SELAMA BERADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

SUDAH BARANG TENTU, DIPILIHNYA MEDAN SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN INI, BAGI KAMI MERUPAKAN SEBUAH KEHORMATAN DAN KEBANGGAAN, KARENA KEDATANGAN BAPAK DAN IBU PESERTA SEKALIAN DIHARAPKAN AKAN MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KITA SEMUA, BAIK DARI SISI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAUPUN DARI SISI UNTUK MENGENAL LEBIH JAUH KEBERADAAN DAN POTENSI YANG DIMILIKI SUMATERA UTARA.

SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI,

KITA TENTU SEMUA MENGETAHUI, BAHWA PENYELENGGARAAN ACARA INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA PENYELENGGARA MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN, PEDOMAN SERTA PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN, YANG BERTUJUAN AGAR PENYELENGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH DAPAT TERLAKSANA DENGAN EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERMANFAAT SERTA SESUAI DENGAN KORIDOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. BAHWA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN AZAS DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. BERKENAAN DENGAN ITU, SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN AZAS DEKONSENTRASI YAITU:

UNTUK TERPELIHARANYA KEUTUHAN NKRI DAN TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR DAERAH SERTA TERWUJUDNYA KESERASIAN HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN TERCAPAINYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SERTA TERCIPTANYA KOMUNIKASI SOSIAL KEMASYARAKATAN, BUDAYA DALAM SISTEM ADMINISTRASI NKRI.

SEDANGKAN AZAS TUGAS PEMBANTUAN, MERUPAKAN CERMINAN DARI SISTEM DAN PROSEDUR PENUGASAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH. PEMBERIAN TUGAS DIMAKSUD UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

SEBAGAI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN AMANAT UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT, TELAH DITETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT, DAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT, GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN AZAS DEKONSENTRASI, MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

WALAUPUN KITA MENYADARI, BAHWA PELAKSANAAN KETENTUAN INI BELUM SECARA MAKSIMAL DAPAT TERLAKSANA, KARENA KITA MASIH DIHADAPKAN DENGAN BERBAGAI KAJIAN DAN KONDISI YANG MASIH MEMERLUKAN PENYEMPURNAAN, TAPI SETIDAK-TIDAKNYA DENGAN ADANYA KETENTUAN TERSEBUT, SUDAH MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DAN DIHARAPKAN MELALUI RAPAT DAN KEGIATAN INI AKAN DAPAT DIREKOMENDASIKAN HAL-HAL PENTING YANG Mendukung Keberadaan GWPP tersebut termasuk di dalamnya dukungan pengalokasian dana kegiatan GWPP oleh Pemerintah Pusat.

BAPAK, IBU DAN HADIRIN SEKALIAN,

PRESIDEN SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB AKHIR PEMERINTAHAN SECARA KESELURUHAN, MELIMPahkan SEBAGIAN KEWENANGANNYA KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA AGAR DALAM MELAKSANAKAN OTONOMINYA DAPAT SESUAI DENGAN KORIDOR NSPK (NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA) DAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL) YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT, MAKA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA PERLU DIBERIKAN DUKUNGAN DAN DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH PUSAT, AGAR DALAM PELAKSANAANNYA DAPAT SESUAI DENGAN NSPK (NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA) DAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL) YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT TERSEBUT.

KITA TENTU MENARUH HARAPAN YANG BESAR MELALUI KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SAAT INI, DALAM UPAYA UNTUK MELAHIRKAN BERBAGAI PEMIKIRAN BARU YANG UP TO DATE, YANG MAMPU MENJADI JAWABAN DARI BERBAGAI PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI DAERAH, KHUSUSNYA DAERAH PROVINSI DI SELURUH INDONESIA. DISAMPING ITU, KITA MENGHARAPKAN SEMOGA KEGIATAN INI DAPAT MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP PELAKSANAAN AZAS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN, DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN AKAN TERLAKSANANYA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LEBIH EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL SERTA SESUAI AZAS DAN PRINSIP TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAPAK IBU DAN HADIRIN SEKALIAN,

DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN DALAM KESEMPATAN INI, DI AKHIR SAMBUTAN INI KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT MENGIKUTI RAPAT KEGIATAN PENYERAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019. SEMOGA KEGIATAN INI BERJALAN DENGAN LANCAR DAN SUKSES, DAN KAMI MENITIP PESAN KEPADA SELURUH PESERTA RAPAT, MARI KITA IKUTI KEGIATAN INI DENGAN SERIUS DAN PENUH SEMANGAT, SELANJUTNYA MARI KITA NIKMATI KEINDAHAN KOTA MEDAN DAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN BERBAGAI KEINDAHAN DAN KENYAMANANNYA SERTA KENIKMATAN KULINERNYA YANG TIADA DUANYA.

AKHIRNYA, SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MELINDUNGI DAN MEMBERKATI SETIAP AKTIVITAS DAN PENGABDIAN KITA.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARUKATUH

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**Dr. Ir. Hj. R. SABRINA, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19610512 198602 2 002**